

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI
DENGAN PIMPINAN KPK, PPATK, BNPT DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	:	2012-2013
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	:	Senin, 10 Juni 2013
Waktu	:	Pukul 10.20 – 14.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Ketua Rapat	:	Drs. Al Muzzammil Yusuf, M. Si / Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Endah Sri Lestari, SH, M.Si / Kabag Set.Komisi III DPR-RI.
Hadir	:	39 orang Anggota dari 52 orang Anggota Komisi III DPR-RI.
Izin	:	04 orang Anggota.
Acara	:	Penyampaian RKP Tahun Anggaran 2014.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Al Muzzammil Yusuf, M. Si dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Hal-hal yang disampaikan oleh Kepala PPATK, sebagai berikut :

- Bahwa pagu indikatif PPATK Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp.64.773.600.000,- atau turun 18 % dibanding tahun 2013. Berdasarkan hasil pertemuan tiga pihak, antara PPATK, Bappenas dan Kementerian Keuangan, pagu indikatif PPATK tersebut telah disepakati untuk dialokasikan dalam Renja PPATK Tahun 2014, yang terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut :
- Program pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21,40 miliar.
- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PPATK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40,37 miliar.
- PPATK juga telah mengajukan usulan tambahan pagu anggaran Tahun 2014 sebesar Rp.35.481.156.000,- kepada Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan melalui usulan *New Inisiatif* Tahun Anggaran 2014.

2. Hal-hal yang disampaikan oleh BNPT, sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan telah ditetapkan pagu indkatif BNPT Tahun 2014 sebesar Rp.152.672.000.000,- dan pagu tambahan (new inisiatif) sebesar Rp.150.000.000.000,- sehingga total pengajuan pagu indikatif sebesar Rp.302.672.000.000,- yang dibagi menjadi beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- Kegiatan penanggulangan terorisme bidang pencegahan, sebesar Rp.136.000.000.000,-
- Kegiatan penanggulangan terorisme bidang penindakan, sebesar Rp.105.300.000.000,-
- Kegiatan penanggulangan terorisme bidang kerjasama internasional, sebesar Rp.15.385.200.000,-
- Kegiatan dukungan administrasi dan SDM, sebesar Rp.45.986.800.000,-

3. Hal-hal yang disampaikan oleh BNN, sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan, tentang pagu indikatif dan rancangan awal RKP 2014, BNN memperoleh pagu indkatif sebesar Rp.791.077.900.000,-. Hal ini berarti terjadi penurunan pagu sebesar Rp.281.474.982.000,- dibandingkan dengan baseline renstra 2014 yaitu Rp.1.085.871.000.000,-
- Kondisi tersebut jauh dari harapan apabila dibandingkan dengan keadaan atau tantangan yang harus dijawab oleh BNN dalam pencapaian kinerja Tahun 2014 dan rencana pembentukan 25 BNNK/Kota.

4. Hal-hal yang disampaikan oleh KPK, sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2014, KPK mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp.591.970,6 juta yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni.
- Pagu indikatif KPK Tahun 2014 menurut program, adalah sebagai berikut :
 - Program pemberantasan tindak pidana korupsi sebesar Rp.170.851,3 juta
 - Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.421.119,3 juta.
- Realisasi Anggaran Pendapatan KPK Tahun 2013 berupa PNBPN 1 Januari sd. 31 Mei 2013 adalah sebesar Rp.104,684,164,891,- yang berasal dari :
 - Penanganan kasus / perkara TPK sebesar Rp.103,868,438,332
 - Penanganan gratifikasi sebesar Rp.815,726,559

5. Hal-hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan :

- F-PD mendukung pembangunan gedung KPK, dan anggaran supervisi dan koordinasi agar menjadi prioritas.
- F-PD setuju dengan peningkatan dukungan terhadap program pencegahan.
- F-PD meminta penjelasan terkait penurunan anggaran PPATK yang sampai 18%, padahal lembaga ini sangat vital dan berkaitan dengan lembaga penegakan hukum lainnya, seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian.

- Pada prinsipnya, F-PD mendukung terhadap pengajuan anggaran seluruh mitra kerja.
- Anggota Komisi III meminta penjelasan terkait bocornya data KPK, apakah dimungkinkan untuk membuat program/tahapan/cara sehingga bisa diketahui data itu bocor dimana. Dan adakah sistem yang dibangun dan anggaran berapa untuk bisa diketahui nanti mana yang mengetahui kebocoran tersebut.
- Bahwa dengan anggaran BNN yang semakin besar, namun peredaran narkoba semakin besar.
- Bahwa sebaiknya CSO ini lebih dikaji lagi programnya. Dan Komisi III meminta penjelasan terkait anggaran bagi komunitas-komunitas yang rawan untuk disalahgunakan, seperti lembaga-lembaga anti korupsi, bukan hanya kampus, intra kampus atau lembaga-lembaga yang tidak diketahui aktivitasnya.
- F-PDI P berpendapat bahwa belum mendapat penjelasan mengenai evaluasi penggunaan anggaran sebelumnya, sehingga tidak memiliki dasar dalam pembahasan hari ini.
- F-PDIP berpendapat bahwa tidak adanya kesinambungan antara anggaran dari tahun ke tahun, misalnya program-program dari tahun 2012 ke 2013.
- F-PG berpendapat, perlunya evaluasi kerjasama mitra strategis KPK secara periodik.
- Terkait dengan anggaran PPATK, banyaknya penanganan pemberantasan korupsi terkait dengan TPPU, yang dikritisi oleh pakar-pakar hukum. Dan apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penanganan TPPU.
- Terkait dengan BNPT, sebaiknya ada penelitian untuk mengetahui sejauhmana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat terhadap penanganan terorisme. Dan pencegahan tindak pidana terorisme agar mengajak unsur-unsur ulama-ulama atau agama lainnya untuk berdiskusi.
- Meminta penjelasan terkait target *Fraud Control* yang menyertakan peran serta dari internal eksekutif.
- Meminta penjelasan BNPT, terkait target dari Program Deradikalisasi yang sebetulnya dapat dinilai kurang efektif dan tepat sasaran.
- F-P Gerindra meminta penjelasan terkait pemanfaatan survey jaringan kerjasama KPK dalam program MoU Mitra Kerja Sama, siapa yang menjadi 10 (sepuluh) mitra kerja KPK.
- Terkait dengan BNPT, ketidakpuasan publik terhadap penindakan yang dilakukan oleh Densus 88 yang kemudian menimbulkan “dendam” dan kemudian menjadi hambatan.
- Terkait dengan anggaran KPK, perlunya evaluasi total terhadap rancangan anggaran yang masih belum dapat dilakukan. Dan diusulkan untuk mengagendakan khusus guna membahas tugas dan kewenangan KPK dalam kaitan dengan program yang diajukan.
- Terkait dengan anggaran KPK, perlunya untuk mengikutsertakan partai politik dalam pembinaan masyarakat.
- Disarankan untuk meningkatkan anggaran untuk pengawasan di bidang penerimaan negara seperti perpajakan dan cukai.
- Terkait dengan anggaran BNPT, agar menghindari seminimal mungkin penindakan dengan senjata api yang dilakukan oleh Densus 88.
- F-PKS mengusulkan agar program pendidikan dan pengaduan masyarakat KPK, perlu dikaji kembali.
- Dukungan anggaran terhadap program pencegahan di sektor penerimaan Negara.
- Penjelasan mitra kerja bahwa terkait RAPBN, telah disesuaikan dengan Renstra yang juga telah dibicarakan bersama.
- KPK menjelaskan bahwa KPK telah melaksanakan program koordinasi dan supervisi dan mulai terlihat hasilnya, terutama di daerah-daerah, dengan

menggunakan program pelatihan dan sosialisasi dengan aparat penegak hukum.

- Bahwa KPK telah mengadakan pendalaman antara lain perencanaan anggaran, substansi, pelayanan publik dan implementasi pengadaan barang/jasa.
- Terkait program pencegahan dengan kerjasama KPK, yakni anggaran CSO, Komisi III meminta nama-nama terkait dengan program mitra kerja CSO.
- Penjelasan PPATK bahwa terkait bocornya rahasia / data. bukan berasal dari PPATK, karena PPATK telah mengembangkan sistem security pusat.
- Terkait dengan “fraud control”, bagaimana pelaksanaannya di KPK sebagai lembaga independen. Dan bagaimana ruang pencegahan yang ada di KPK.
- Terkait anggaran BNPT, perlu adanya penanganan napi teroris yang sistematis di Dirjen Lapas.

III. PENUTUP

RDP Komisi III dengan Pimpinan KPK, PPATK, BNPT dan BNN tidak mengambil kesimpulan / keputusan, dan selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 akan ditindaklanjuti dalam Rapat Komisi III DPR RI, untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas dan diproses sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Rapat ditutup tepat pukul 14.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.SI